

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Edisi cetakan pertama). Bekasi: UB Press.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah Otonomi*. Yogyakarta: Bunga Rampai. 2011
- Irianto, E. D. (2009). *Pajak Negara dan Demokrasi Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Kurniawan, P., & Purwanto. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bekasi: Bayumedia Publishing.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik*. Edisi–III. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Prakoso, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Ramses, A., & Bakry, L. (2009). *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Edisi cetakan pertama). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, A. (1779). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York: Modern Liberty.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.”
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tmbooks. (2013). *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andy Offset.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Suseno Triyanto. (1999). *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : Rajawali Pers.

Pemerintah:

- _____. (1999). *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.*
- _____. (1999). *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999. Tentang Sistem Pemerintahan Desentralisasi.*
- _____. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Jurnal:

- Bajiigo, H. E. (2011). *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Studi Kasus Di Kota/Kota Pemerintahan Provinsi Di Jawa Tengah.* Jurnal Prespektif Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari.
- Enceng., Irianto L. B., & Purwaningdyah M. W. (2012). *Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah.* Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012:1-73.
- Gumilang, Galang Surya. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling.* Jurnal Fokus Konseling, 2, 144-159.
- Indrianti, I., Suhendro.,& Endang, Masitoh. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta).* Seminar Nasional IENACO, 712-717.
- Mangkuprawira, S., Siregar, H., & Sinaga B. M. (2009). *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat.* Jurnal Organisasi dan Management, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, 1-9.
- Wahyuni, Nanik. (2010). *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.* Jurnal Akuntansi FE UIN Maliki Bekasi.
- Widayat, W. (1994). *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah,* Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-3

Website :

Nurhayati, (2018, Juli 19) Lima Tahun, PAD Kota Bogor Naik 70%. 8 Juli 2019.<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/07/09/lima-tahun-pad-Kota-bogor-naik-70-427123>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2012). Kenali Aturan Dalam Pelaporan Pajak. 10 Maret 2019. <http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak>.